

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Dalam bagian ini pula akan disajikan sebagai berikut, pada bagian pertama yaitu tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menggambarkan konsep dasar mengenai variabel yang diteliti, dan yang kedua yaitu diikuti dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai kerangka pemikiran tentang model variabel, yang nantinya disertai dengan hipotesis yang diajukan.

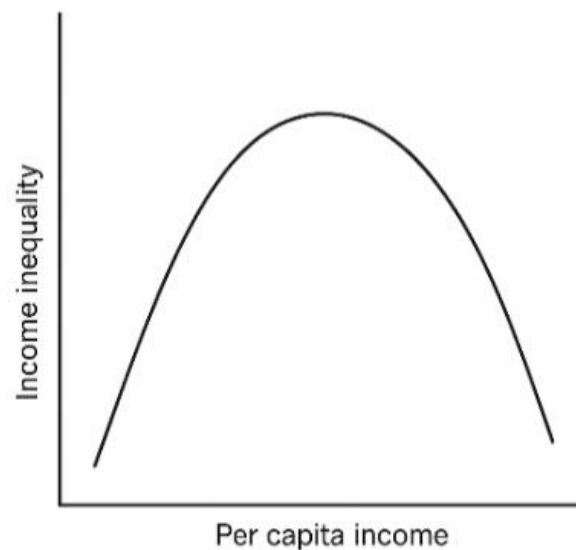
##### **2.1.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Menurut Todaro dalam Rozali (2020), ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Menurut Kalalo Tiffany *et al.* (2016), distribusi pendapatan merupakan proses pembagian pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kontribusi masing-masing faktor produksi. Para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan sesuai dengan nilai faktor yang mereka sumbangkan dalam proses produksi. Dalam mekanisme ini, masyarakat berperan ganda, pada satu sisi

sebagai konsumen yang membayar harga barang, dan pada sisi lain sebagai penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau keahlian sehingga berhak menerima pendapatan. Dengan demikian, pola distribusi pendapatan yang tidak merata dalam proses produksi dan konsumsi dapat memperkuat terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat.

#### **2.1.1.1 Teori Kurva Kuznets dalam Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Teori Kurva Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ketimpangan tersebut akan mulai menurun ketika pembangunan telah mencapai fase yang lebih maju dan manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan secara lebih luas dan merata. Teori Kurva Kuznets yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan membentuk pola U terbalik (*inverted-U*). Dalam proses awal pembangunan, ketimpangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat cenderung meningkat akibat perbedaan akses terhadap modal, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Namun, apabila pembangunan terus berlanjut disertai dengan meningkatnya mobilitas modal dan tenaga kerja serta meluasnya kesempatan kerja, maka ketimpangan pendapatan di suatu wilayah akan mengalami penurunan. Dengan demikian, ketika wilayah yang bersangkutan telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih maju, ketimpangan distribusi pendapatan cenderung berkurang secara bertahap (Oktarina & Yuliana, 2023).



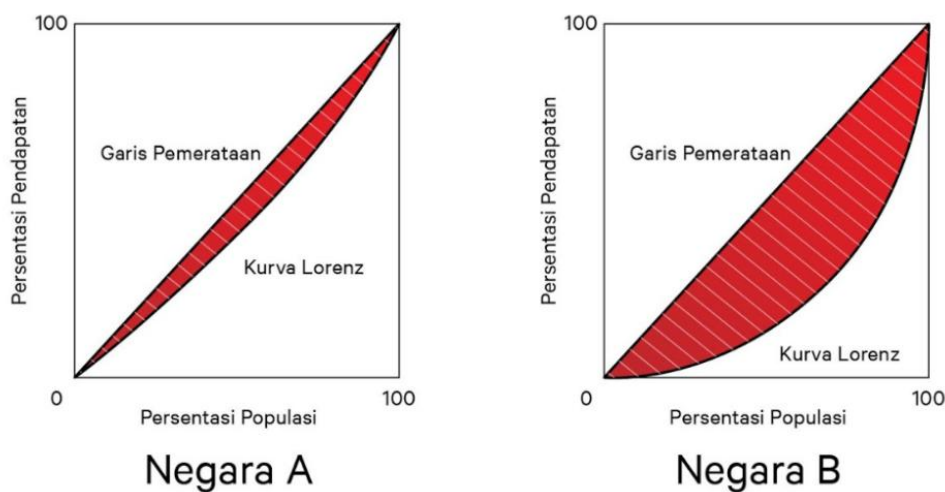
*Sumber : Simon Kuznets dalam (Hermawan & Taher, 2025))*

### **Gambar 2.1 Pola U Terbalik (Kurva Kuznets)**

Pada Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketika pendapatan per kapita masih rendah dan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, ketimpangan pendapatan relatif rendah karena sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang hampir sama. Namun, seiring berkembangnya perekonomian, sebagian tenaga kerja berpindah ke sektor modern yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat, karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi tersebut. Ketika pembangunan mencapai tahap lanjut, pendidikan, teknologi, akses layanan publik, serta kebijakan negara mulai membaik dan dinikmati secara lebih merata. Pada kondisi tersebut, maka pemerataan pendapatan terjadi dan ketimpangan mulai menurun (Hermawan & Taher, 2025).

### 2.1.1.2 Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Rudy C Tarumingkeng (2025) menyebutkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif populasi (dari yang termiskin hingga terkaya) dengan persentase kumulatif pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki.



*Sumber : ruang guru*

**Gambar 2.2 Kurva Lorenz**

Berdasarkan Gambar 2.2 menunjukkan perbandingan kurva Lorenz antara Negara A dan Negara B yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Pada Negara A, kurva Lorenz terlihat lebih dekat dengan garis pemerataan dibandingkan dengan Negara B. Artinya, kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah tidak terlalu besar. Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis pemerataan, maka semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam suatu negara. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Negara A cenderung lebih merata dibandingkan dengan Negara B.

Pada Negara B, kurva Lorenz lebih melengkung dan semakin menjauhi garis pemerataan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Negara B lebih timpang. Sebagian besar pendapatan kemungkinan hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, sementara sebagian besar penduduk lainnya memperoleh pendapatan yang relatif kecil. Berdasarkan analisis, Negara A memiliki kondisi distribusi pendapatan yang lebih baik dibandingkan Negara B, karena tingkat ketimpangan lebih rendah. Dengan demikian, pemerataan pendapatan di Negara A lebih optimal, sehingga kesenjangan ekonomi antar masyarakat tidak terlalu besar.

Titik awal kurva (0,0) berarti tidak ada individu, tidak ada pendapatan dan titik akhir (1,1) berarti 100% penduduk menguasai 100% pendapatan. Jika, situasi ideal di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sehingga 20% populasi memiliki 20% pendapatan, 50% populasi memiliki 50%, dan seterusnya (Rudy C Tarumingkeng, 2025).

### **2.1.1.3 Faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

#### **1. Jumlah Penduduk**

Salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan adalah jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dari penduduk itu sendiri akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik jika pertumbuhan penduduk yang tinggi diikuti juga dengan adanya peningkatan kualitas penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang banyak cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal

ini terjadi jika meningkatnya jumlah penduduk tidak diikuti juga dengan meningkatnya kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali menyebabkan peningkatan persaingan di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menekan upah dan kesejahteraan ekonomi bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang memadai akan mendorong meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat (Yuliana & Rosyadi, 2025).

## 2. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak langsung pada kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih tinggi. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga membuka peluang untuk memasuki sektor formal dengan tingkat pendapatan yang lebih stabil. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan cenderung mendorong masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak menentu, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan Nesha Rizky Ashari *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan menjadi

salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat

### 3. Kemiskinan

Selain jumlah penduduk dan pendidikan, kemiskinan juga merupakan faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Ardian & Prabowo (2024), bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemiskinan di suatu wilayah, maka semakin besar pula perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat. Kondisi kemiskinan membatasi akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, sehingga kelompok penduduk miskin cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu.

### 4. Pengangguran

Pengangguran juga turut berperan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan. Jumlah pengangguran yang tinggi memiliki potensi besar untuk memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh langsung pengangguran terhadap jumlah pendapatan yang diterima oleh individu dan rumah tangga. Ketika tingkat pengangguran meningkat, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pengangguran juga dapat menyebabkan penurunan keterampilan dan kehilangan peluang karir, yang

pada akhirnya akan berdampak pada ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang (Ashari *et al.* 2024)

### **2.1.2 Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan individu yang cenderung bertambah secara cepat mengikuti deret ukur, sedangkan ketersediaan pangan dan sumber daya penunjang kehidupan hanya bertambah mengikuti deret hitung. Menurut Hayati *et al.* (2023) pertumbuhan penduduk yang semakin cepat dan mendorong perkembangan dalam aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dalam hal ini kependudukan sangat berpengaruh besar terhadap komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan pemerataan akses terhadap lapangan kerja berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan, karena semakin banyak individu yang bersaing untuk sumber daya dan kesempatan ekonomi yang terbatas, sehingga kelompok berpendapatan rendah semakin sulit meningkatkan kesejahteraannya.

#### **2.1.2.1 Teori Kependudukan**

##### **1. Teori Malthusian**

Menurut Malthus dalam Syahra & Riyanti (2025) bahwa teori ini menekankan adanya potensi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara eksponensial dan ketersediaan sumber daya, terutama pangan, yang meningkat secara linear. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan persaingan antar penduduk dalam memperoleh sumber daya ekonomi menjadi semakin tinggi, sehingga hanya kelompok tertentu yang mampu memenuhi

kebutuhannya sementara kelompok lainnya tertinggal akibat akses yang terbatas. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki modal, aset, dan pendidikan yang lebih baik cenderung mampu bertahan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan kelompok berpendapatan rendah semakin tertekan oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia. Akibatnya, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar karena pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar.

## 2. Teori Transisi Demografi

Teori transisi demografi dikembangkan oleh Frank W. Notestein (1953) dalam Sulistiawati (2021) teori ini merupakan perubahan yang historis dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat kelahiran dan kematian yang rendah seiring dengan perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Proses transisi ini berlangsung dalam tiga tahap sebagai berikut :

### a. Tahap Pra-Industri

Ditandai dengan tingginya angka kelahiran dan tingginya angka kematian sehingga pertumbuhan penduduk cenderung rendah tetapi tidak stabil.

### b. Tahap Transisi

Pada tahap ini angka kematian menurun drastis karena perbaikan kesehatan, sanitasi, dan standar hidup, sementara angka kelahiran masih tetap tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat.

c. Tahap Akhir atau Tahap Modern

Ditandai dengan penurunan angka kelahiran hingga mendekati tingkat kematian, sehingga pertumbuhan penduduk kembali melambat dan cenderung stabil. Dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan, kondisi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Produktivitas dan pendapatan wilayah dapat meningkat, namun hanya penduduk dengan pendidikan dan keterampilan memadai yang mampu memanfaatkannya, sedangkan penduduk berkemampuan rendah cenderung tertinggal sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan.

### 2.1.2.2 Pengukuran Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) pengukuran jumlah penduduk dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

$P_t$  = Jumlah penduduk pada tahun ke – t

$P_0$  = Jumlah penduduk pada tahun dasar

$r$  = Laju pertumbuhan penduduk per tahun

$t$  = Selang waktu (tahun)

### 2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Menurut Arum & Haris (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, diantaranya yaitu :

1. Kelahiran (*Fertilitas*)

Kelahiran merupakan komponen utama pertama yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk, di mana proses ini cenderung menyebabkan peningkatan populasi di suatu wilayah. Tingkat fertilitas yang tinggi akan

meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan penurunan fertilitas dapat menurunkan pertumbuhan tersebut.

## 2. Kematian (*Mortalitas*)

Kematian, merupakan komponen kedua yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk, karena keberadaannya cenderung mengakibatkan penurunan populasi di suatu wilayah.

## 3. Perpindahan Penduduk (*Migrasi*)

Perpindahan penduduk merupakan salah satu aspek dinamika penduduk yang umumnya didorong oleh kebutuhan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kualitas kehidupan tersebut dapat dievaluasi dari sudut pandang ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kondisi sosial, budaya, dan politik yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah asal.

### **2.1.3 Pendidikan**

Menurut Sukirno dalam Harahap & Syahbudi (2022) pendidikan merupakan investasi yang paling berguna untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan yang manfaatnya baru dirasakan pada masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan keterampilan. Melalui pendidikan, diharapkan berbagai permasalahan ekonomi dapat diatasi dengan cara meningkatkan kemampuan manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

### 2.1.3.1 Teori Pendidikan

#### 1. Teori modal manusia (*human capital theory*)

Teori modal manusia dikembangkan oleh Becker (1985) dalam Fahmi (2022) menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang yang memberikan *return* dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, stabilitas kerja yang lebih baik, serta peluang mobilitas sosial ke atas. Berdasarkan Teori Modal Manusia tersebut, pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan karena peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat memperkecil perbedaan kemampuan produktif antarindividu. Ketika kesempatan memperoleh pendidikan yang layak semakin merata, peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi dan stabil juga menjadi lebih setara. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai mekanisme pemerataan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan mobilitas sosial, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dapat ditekan.

Dalam praktiknya, peningkatan pendidikan yang belum merata justru dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar berupa akses terhadap pekerjaan formal, upah yang lebih tinggi, serta peluang karier yang lebih luas, sementara kelompok dengan tingkat pendidikan rendah cenderung terjebak pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil. Perbedaan tingkat *return* pendidikan tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan

antarindividu dan antarkelompok masyarakat semakin melebar. Dengan demikian, meskipun pendidikan secara teoritis berfungsi sebagai alat pemerataan, ketidakseimbangan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat menjelaskan temuan empiris bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## 2. Teori permintaan dan penawaran tenaga kerja

Menurut Alfred Marshall dalam Sari & Sugiharti (2016) dalam perspektif ekonomi pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi dalam modal manusia yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas pekerja. Pekerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dianggap mampu menghasilkan output yang lebih besar dan berkualitas, sehingga perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja dengan pendidikan yang baik. Kondisi ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi cenderung lebih besar dan kelompok pekerja tersebut umumnya menerima tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang kurang berpendidikan.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, pendidikan mempengaruhi jumlah dan karakteristik individu yang bersedia bekerja di pasar kerja. Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin besar peluang dan kesiapan mereka untuk memasuki pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis maupun keterampilan tertentu. Pendidikan membentuk preferensi pekerja terhadap jenis pekerjaan, lingkungan kerja, serta tingkat upah yang dianggap layak. Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung menawarkan tenaganya pada pekerjaan dengan kualifikasi yang lebih baik, sementara

mereka yang berpendidikan rendah lebih banyak memasuki pekerjaan berupah rendah dengan persyaratan keterampilan minimal.

Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya segmentasi pasar tenaga kerja berdasarkan pendidikan, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapatan antarindividu. Kelompok pekerja berpendidikan tinggi memperoleh pendapatan yang relatif lebih besar dan stabil, sedangkan pekerja berpendidikan rendah cenderung memperoleh pendapatan yang lebih rendah dan tidak stabil. Dengan demikian, apabila peningkatan pendidikan tidak diikuti dengan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, maka pendidikan dapat berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sebagaimana tercermin dalam perbedaan tingkat upah dan kesempatan kerja antar kelompok masyarakat.

### 3. Teori segmentasi

Teori segmentasi dalam pendidikan menjelaskan bahwa sistem pendidikan tidak bersifat homogen, melainkan tersegmentasi berdasarkan kualitas sekolah, jalur pendidikan, latar belakang sosial ekonomi dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Segmentasi ini menyebabkan adanya pemisahan antara kelompok siswa yang dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi dan kelompok siswa yang hanya memperoleh Pendidikan berkualitas rendah. Menurut Bowles dan Gintis (1976) dalam Li (2019) pendidikan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi social dimana siswa dari keluarga berpendidikan tinggi dan berpenghasilan lebih baik cenderung masuk ke lembaga pendidikan berkualitas,

sementara siswa dari keluarga berpendapatan rendah cenderung berada dalam institusi pendidikan yang kualitasnya rendah.

Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan hasil pendidikan dan peluang ekonomi di masa depan. Lulusan dari institusi pendidikan berkualitas tinggi umumnya memiliki keterampilan, jaringan sosial, dan kredensial yang lebih baik sehingga memperoleh akses ke pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan stabil. Sebaliknya, lulusan dari institusi pendidikan berkualitas rendah memiliki keterbatasan dalam bersaing di pasar tenaga kerja dan cenderung bekerja pada sektor dengan upah rendah. Perbedaan *return* pendidikan ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antarindividu semakin melebar. Dengan demikian, pendidikan yang tersegmentasi dan tidak merata justru dapat berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, karena memperkuat perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi.

### 2.1.3.2 Pengukuran Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2025) :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$x_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

### 2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan

Menurut Jamal *et al.*(2021) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan, yaitu :

#### 1. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Semakin ideal rasio tersebut, semakin efektif proses pembelajaran karena guru dapat memberikan perhatian dan pendampingan yang lebih optimal kepada setiap siswa. Sebaliknya, rasio yang terlalu tinggi menyebabkan guru kesulitan mengelola kelas dan memberikan dukungan belajar secara menyeluruh. Ketidakseimbangan rasio guru murid ini berdampak langsung pada variasi kualitas hasil belajar antar wilayah. Daerah yang memiliki rasio guru lebih memadai cenderung menghasilkan lulusan dengan kompetensi lebih baik dan peluang kerja lebih tinggi, sehingga berpotensi mengurangi risiko masuk ke kelompok berpenghasilan rendah. Dengan demikian, ketimpangan dalam rasio guru–murid ikut memperlebar ketimpangan pendapatan melalui perbedaan kualitas sumber daya manusia.

#### 2. Rasio sekolah dan kelas terhadap murid

Ketersediaan sekolah dan ruang kelas yang memadai menentukan kemudahan akses siswa terhadap pendidikan. Daerah dengan jumlah sekolah dan ruang kelas yang cukup cenderung memberikan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sementara daerah dengan fasilitas terbatas menghadapi kepadatan kelas dan keterbatasan ruang belajar. Kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi belajar, mempengaruhi efektivitas pengajaran, dan

memperburuk kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ketimpangan fasilitas ini membuat peserta didik di wilayah tertentu memiliki kualitas pendidikan lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan infrastruktur lebih lengkap. Akibatnya, lulusan dari daerah dengan fasilitas minim seringkali kurang kompetitif di pasar kerja dan memiliki peluang ekonomi lebih kecil, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

### 3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, dan sarana pendukung lainnya berperan penting dalam meningkatkan mutu proses belajar. Sekolah dengan sarana prasarana memadai mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap sehingga hasil belajarnya jauh lebih baik. Sementara itu, sekolah yang minim fasilitas mengalami keterbatasan dalam pengembangan keterampilan peserta didik.

#### **2.1.4 Kemiskinan**

Menurut Chambers dalam Suryawati (2022) kemiskinan merupakan sebuah konsep terpadu yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan atau tidak tercukupinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup ketidakberdayaan individu dalam menentukan dan mengontrol kondisi kehidupannya. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya kerentanan terhadap berbagai guncangan seperti bencana, ketidakstabilan ekonomi, atau keadaan darurat lain yang dapat memperburuk kondisi hidup. Selain itu, kemiskinan menunjukkan adanya ketergantungan terhadap bantuan pihak luar karena

keterbatasan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh keterasingan sosial maupun geografis yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan jaringan sosial yang lebih luas.

#### **2.1.4.1 Teori Kemiskinan**

##### **1. Teori kemiskinan absolut**

Teori kemiskinan absolut dikembangkan oleh Benjamin Seebohm Rowntree (1901) dalam Rosana (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang atau rumah tangga memiliki tingkat pendapatan yang tidak mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam konteks ketimpangan distribusi pendapatan, teori ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya tercermin dari adanya perbedaan pendapatan antar individu atau antar kelompok masyarakat, tetapi juga dari kemampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

##### **2. Teori kemiskinan structural**

Teori yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal dalam Rupita & Niko (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural muncul bukan semata karena keterbatasan kemampuan individu, melainkan sebagai akibat dari struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Ketidakadilan dalam struktur tersebut menjadikan akses terhadap sumber daya produktif seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, modal usaha, serta kontrol atas tanah tidak

terdistribusi secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural berperan besar dalam menghasilkan dan memperkuat ketimpangan pendapatan, sebab hanya kelompok tertentu yang dapat memperoleh manfaat pembangunan, sementara kelompok lain tetap berada dalam kondisi yang secara sistemik membatasi mobilitas ekonomi mereka.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Tingkat Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (2024) tingkat kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P_0 = \frac{q}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

$P_0$  = Tingkat kemiskinan

$q$  = Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY berbeda pada setiap kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk miskin di Kulon Progo sebesar 71,48 ribu, di Bantul sebesar 126,93 ribu, di Gunung Kidul sebesar 120,41 ribu, di Sleman sebesar 97,94 ribu, dan Kota Yogyakarta sebesar 28,79 ribu, sedangkan jumlah penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan yaitu sebesar 445,55 ribu)

$n$  = Jumlah total penduduk

#### **2.1.4.3 Karakteristik Kemiskinan**

Menurut Supriatna dalam Kadj (2022) menyebutkan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain :

1. Tidak memiliki sumber daya atau faktor produksi secara mandiri.

2. Tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha atau modal sendiri dan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.
3. Sebagian besar tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang memadai.

#### **2.1.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan**

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu (Syafii, 2020) :

##### **1. Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam terbentuknya kualitas sumber daya manusia. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, sehingga hanya mampu bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah. Dengan demikian, rendahnya pendidikan memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan.

##### **2. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu, terutama pemilik modal, sementara kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak merasakan dampaknya secara signifikan. Ketidakmerataan ini menyebabkan distribusi pendapatan menjadi timpang, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai pendapatan dalam jumlah besar, sementara sebagian besar lainnya tetap dalam kondisi kemiskinan.

### **2.1.5 Pengangguran**

Menurut Sukirno dalam Artiza *et al.* (2022) pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja, aktif mencari pekerjaan, namun belum memperoleh pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan. Pengangguran tidak hanya merujuk pada individu yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak sesuai kemampuan dan kualifikasinya tetapi belum terserap oleh pasar tenaga kerja. Pengangguran merupakan fenomena yang muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja yang ada dalam perekonomian. Ketika pertumbuhan tenaga kerja meningkat lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja, maka sebagian individu tidak dapat terserap sehingga menimbulkan pengangguran. Kondisi ini juga dapat diperburuk oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, perubahan struktur ekonomi, serta fluktuasi dalam kegiatan produksi.

#### **2.1.5.1 Teori Pengangguran**

##### **1. Teori pengangguran klasik**

Teori pengangguran klasik dikemukakan oleh David Ricardo dalam Taufiq *et al.* (2025) pengangguran muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara upah dan produktivitas tenaga kerja. Dalam pandangan klasik, jika upah ditetapkan lebih tinggi dari tingkat keseimbangan pasar, maka perusahaan akan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja karena biaya produksi meningkat melebihi nilai produktivitas yang dihasilkan.

Kondisi ini menyebabkan sebagian pekerja tidak terserap dan akhirnya menjadi penganggur. Dalam konteks ketimpangan distribusi pendapatan, mekanisme tersebut berpotensi memperburuk kesenjangan karena hanya individu yang memiliki keterampilan tinggi atau modal yang mampu mempertahankan pendapatannya, sedangkan kelompok berpendapatan rendah yang kehilangan pekerjaan akan semakin terpinggirkan secara ekonomi. Dengan demikian, teori pengangguran klasik menjelaskan bahwa ketidakseimbangan pasar tenaga kerja dapat memperkuat ketimpangan pendapatan melalui berkurangnya akses terhadap pekerjaan produktif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

## 2. Teori pengangguran keynesian

Teori Keynesian, yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam Dzikrulloh & Rosul (2024) pengangguran terjadi karena rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian, sehingga pasar tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa melemah, perusahaan menurunkan kapasitas produksinya dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Situasi ini menyebabkan pendapatan kelompok pekerja turun secara signifikan, sementara kelompok yang memiliki modal atau aset produktif cenderung tetap memperoleh pendapatan dari keuntungan investasi dan aset mereka. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, kondisi tersebut memperbesar jarak antara kelompok pekerja yang kehilangan pendapatan dan kelompok pemilik modal yang tetap mendapatkan imbal hasil, sehingga distribusi

pendapatan menjadi semakin timpang akibat ketidakseimbangan struktur ekonomi.

### 3. Teori *Okun's law*

Teori *Okun's law* pertama kali dikemukakan oleh Arthur M. Okun (1962) dalam Wahyuni & Kusri (2021) yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan output atau Produk Domestik Bruto sebesar sekitar 2 hingga 3 persen. Hubungan ini menggambarkan bahwa perekonomian kehilangan potensi produksi Ketika Sebagian tenaga kerja tidak terserap dalam kegiatan produktif. Dalam konteks ketimpangan distribusi pendapatan, teori *Okun's Law* menjadi relevan karena pengangguran tidak hanya mencerminkan hilangnya kesempatan kerja, melainkan juga hilangnya sumber pendapatan bagi kelompok masyarakat tertentu. Ketika pengangguran meningkat, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah paling merasakan dampaknya, karena mereka sangat bergantung pada pendapatan kerja sebagai sumber utama kehidupan. Penurunan kesempatan kerja menyebabkan pendapatan mereka menurun, sehingga ketimpangan pendapatan antara kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi semakin melebar.

#### 2.1.5.2 Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024) tingkat pengangguran terbuka diformulasikan sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT = Tingkat pengangguran terbuka

Jumlah Penganggur = Penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan

Angkatan Kerja = Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan

### **2.1.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran**

Menurut Simalango (2024) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu :

#### **1. Kualitas sumber daya manusia**

Kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan dan keterampilan turut menentukan kemampuan seseorang untuk bersaing di pasar kerja. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan menyebabkan tenaga kerja sulit terserap dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, sehingga memperbesar angka pengangguran.

#### **2. Investasi dan kondisi wilayah**

Investasi dan kondisi wilayah memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat pengangguran di suatu daerah. Daerah dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi cenderung lebih menarik bagi investor karena biaya produksi dan distribusi menjadi lebih efisien. Masuknya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dessie Yuliana dan Rosyadi (2025) Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat	- Ketimpangan Distribusi Pendapatan - Jumlah Penduduk	- Investasi Indeks Pembangunan Manusia - Pendidikan - Pengangguran - Kemiskinan	Secara simultan antara jumlah penduduk, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial jumlah penduduk dan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.14 No.1 Januari-Februari 2025. e-ISSN: 2774-7042 p-ISSN: 2302-8025
2	Yenni Del Rossan dan Ingra Sovita (2016) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Pengangguran	- Derajat desentralisasi fiskal - PDRB - Pendidikan - Kemiskinan	Secara simultan PDRB, jumlah penduduk, pengangguran, dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan	Jurnal Menara Ekonomi. ISSN: 2407-8565. Vol. II No.4. Oktober 2016.
3	Muhammad Refkhi Al Aqilah <i>et al.</i> (2024) Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Kemiskinan	- PDRB - Upah minimum - Indeks pemberdayaan gender - Pendidikan - Pengangguran	Secara simultan antara jumlah penduduk, PDRB, IDG, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi	Jurnal Hukum Administrasi dan Ilmu Sosial. Vo. 4 No 1 2024.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pendapatan. Secara parsial, PDRB dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
3	Muhammad Refkhi Al Aqilah <i>et al.</i> (2024) Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Kemiskinan	- PDRB - Upah minimum - Indeks pemberdayaan gender - Pendidikan - Pengangguran	Secara simultan antara jumlah penduduk, PDRB, IDG, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial, PDRB dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Jurnal Hukum Administrasi dan Ilmu Sosial. Vo. 4 No 1 2024.
4	Nineng Noer Laila <i>et.al.</i> (2024) Analisis Pengaruh Pengeluaran Per Kapita, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2019	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pendidikan	- Kesehatan - Pengeluaran per kapita - Kemiskinan - Jumlah penduduk - Pengangguran	Secara simultan antara pengeluaran per kapita, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan. Secara parsial, pengeluaran per kapita berpengaruh negative dan signifikan.	Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan. Vol 1. No 3. 2024. E -ISSN 3021-8063.
5	Neng Mutiara Salsabila dan Umban Adi Jaya (2024) Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Kemiskinan	- Pengangguran - Pendidikan	Secara simultan semua variabel signifikan. Secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan	Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis. Vol. 2 No.2. 2024, ISSN 296-0606.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Muara Ati Asri Ariasta dan Ririt Iriani Sri Setiawati (2022) Dampak TPT, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Daerah Jawa Timur	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Pengangguran	- IPM - Kemiskinan Pendidikan	Secara simultan antara TPT, IPM dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan. Secara parsial IPM dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan Sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis. Vol 14, Nomor 3, September 2024. E-ISSN 2614-1523.
7	Neva Rodiyatul Sholikhah dan Niniek Imaningsih (2022) Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DIY	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pengangguran	- Pertumbuhan ekonomi - IPM - Pendidikan - Jumlah penduduk - Kemiskinan	Secara simultan pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran berpengaruh signifikan. Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan	Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No. 3 (2022), 247-253. E-ISSN : 2720-9660
8	Sri Indriyani S Dai <i>et.al.</i> (2023) Analisis Pengaruh RLS, Pengeluaran Per Kapita, UHH, Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pendidikan - Kemiskinan	- Pengeluaran per kapita - UHH - Pengangguran - Jumlah penduduk	Pengeluaran kapita berpengaruh negatif dan signifikan, UHH berpengaruh negatif dan signifikan dan Kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Jurnal Ekonomi Pembangunan No1, Januari 2023. E-ISSN 2599-3410.
9	Nesha Rizky Ashari <i>et al.</i> (2024) Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan	- Ketimpangan Distribusi Pendapatan - Pendidikan - Pengangguran - Kemiskinan	- Jumlah Penduduk	Secara keseluruhan, ketiga variabel independen ini secara simultan memengaruhi ketimpangan pendapatan dengan signifikansi yang relevan	Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains. Vol. 13, 2. ISSN : 2303-2952.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Nesha Rizky Ashari <i>et al.</i> (2024) Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan	- Ketimpangan Distribusi Pendapatan - Pendidikan - Pengangguran - Kemiskinan	- Jumlah Penduduk	Secara keseluruhan, ketiga variabel independen ini secara simultan memengaruhi ketimpangan pendapatan dengan signifikansi yang relevan.	Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains. Vol. 13, 2. ISSN : 2303-2952.
10	Ikke Sugiarti dan Rendra Erdkhadifa (2023) Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Timur tahun 2021	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk - Pendidikan - Pengangguran	- IPM - Pertumbuhan ekonomi - Kemiskinan	IPM, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 5 No.5 (2023) E-ISSN 2656-4351.
11	Dika Romadona <i>et al.</i> (2024) Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pendidikan - Pengangguran	- Pertumbuhan ekonomi - Jumlah penduduk - Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dan pendidikan berpengaruh negatif signifikan serta pengangguran berpengaruh positif	Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol.3 No. 1. E-ISSN 2963-7642, 169-175.
12	Muhammad Farhan dan Sugianto (2022) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Kemiskinan - Pengangguran	- IPM - Jumlah penduduk - Pendidikan	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, sedangkan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan	Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Teknologi dan Pendidikan Vol 1 No. 4 Maret 2022. E-ISSN 2809-8544.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pendapatan di Pulau jawa, IPM berpengaruh signifikan	
12	Muhammad Farhan dan Sugianto (2022) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Kemiskinan - Pengangguran	- IPM - Jumlah penduduk - Pendidikan	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, sedangkan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau jawa, IPM berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Teknologi dan Pendidikan Vol 1 No. 4 Maret 2022. E-ISSN 2809-8544.
13	Devi Yuliana Putri <i>et al.</i> (2024) Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pengangguran Pendidikan	- Pengeluaran per kapita - Inflasi - Upah minimum - Jumlah penduduk kemiskinan	Pengeluaran Per kapita berpengaruh negatif tidak signifikan, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY	Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Digitalisasi Vol 3 No. 1, 2024. E-ISSN 2962-8520.
14	Cetta Rasendriya <i>et al.</i> (2025) Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali	- Ketimpangan Distribusi Pendapatan Jumlah Penduduk	- PMA - PDRB - Indeks Pembangunan Manusia	IPM berpengaruh negatif dan signifikan, PMA berpengaruh positif dan signifikan, pendidikan berpengaruh signifikan dan positif, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif	Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 02, No. 12, Juni

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Butler <i>et al.</i> (2020) <i>Population Change and Income Inequity in Rural America</i>	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Jumlah penduduk	- Pengangguran - Pendidikan - Kemiskinan	Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	HHS Public Access Author Manuscript Popul res Policy Rev. Author Manuscript : available in PMC 2020 November 05.
16	Muryani <i>et al.</i> (2021) <i>Dynamics of Income Inequality, Investment and Unemployment in Indonesia</i>	- Ketimpangan distribusi pendapatan - Pengangguran	- Jumlah penduduk - Pendapatan per kapita	Pendapatan per kapita berpengaruh positif dengan peningkatan dalam jangka pendek dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Journal of Population and Social Studies Vol. 29 (2021).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menjelaskan serta menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka serta temuan penelitian terdahulu. Garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2024.

### 2.2.1 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hubungan jumlah penduduk dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh teori Pertumbuhan Penduduk Malthus, yang menyatakan bahwa

pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat memperlebar kesenjangan ekonomi karena sumber daya produktif seperti tanah, modal, dan lapangan kerja semakin terbatas. Akibatnya, sebagian besar penduduk terutama dari kelompok berpendapatan rendah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya, keterampilan, dan modal yang lebih besar cenderung mampu bertahan bahkan meningkatkan pendapatannya karena memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi. Ketidakseimbangan kemampuan tersebut pada akhirnya mendorong distribusi pendapatan yang semakin timpang dan memperlebar jarak kesejahteraan antar kelompok masyarakat (Syahra & Riyanti, 2025).

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan tekanan terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dapat memperlebar ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Ketika jumlah penduduk meningkat, persaingan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah dan modal mengalami peningkatan, sehingga kelompok berpendapatan rendah akan semakin tertinggal dibandingkan kelompok yang berpendapatan tinggi (Wahyuni & Andriyani, 2022).

Beberapa penelitian telah menunjukkan pengaruh positif antara jumlah penduduk dan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Seperti penelitian oleh Rosan dan Sovita (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah

penduduk memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut penelitian Rasendriya *et al.* (2025) menyebutkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya ekonomi, tetapi mengakibatkan adanya persaingan yang lebih besar dalam memperoleh pendapatan, lapangan pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, semakin tinggi pula potensi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

### **2.2.2 Hubungan Pendidikan dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Keterkaitan antara pendidikan dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipahami melalui Teori Modal Manusia yang memandang pendidikan sebagai bentuk investasi pada individu untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Ketika akses terhadap pendidikan belum dinikmati secara merata, hanya sebagian kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kondisi ini menyebabkan individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, sementara kelompok berpendidikan rendah cenderung bertahan pada pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah (Fahmi, 2022).

Sejalan dengan Teori Modal Manusia, pendidikan diyakini mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas individu yang

berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Hal tersebut diperkuat dalam temuan Agustini *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan modal manusia melalui pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas individu, baik dari aspek keterampilan maupun kemampuan kerja, sehingga memperluas peluang ekonomi. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan individu untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ashari *et al.* (2024) menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan mampu menekan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pendidikan yang lebih merata dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas individu secara luas, sehingga membuka peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih stabil. Ketika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan untuk memasuki sektor formal dengan upah yang layak menjadi lebih besar, sementara ketergantungan pada pekerjaan berupah rendah dapat dikurangi. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai instrumen penting dalam pemerataan pendapatan karena mampu memperkecil kesenjangan kemampuan kerja dan peluang ekonomi antarindividu, sehingga mencegah terjadinya konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu saja

### **2.2.3 Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Fenomena kemiskinan yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dianalisis menggunakan Teori Kemiskinan Struktural, yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kelemahan individu, seperti rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan saja, tetapi bisa disebabkan oleh adanya struktur sosial dan ekonomi yang tidak merata. Struktur tersebut menciptakan kondisi di mana distribusi sumber daya, kesempatan kerja, dan akses terhadap pendidikan serta pelayanan publik tidak merata. Akibatnya, sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara kelompok lainnya terpinggirkan dan sulit meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, struktur yang timpang membuat akses terhadap sumber daya produktif menjadi tidak merata di antara kelompok masyarakat (Rupita & Niko, 2020).

Kemiskinan memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk miskin menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan peluang pekerjaan yang layak, sehingga memperlebar ketimpangan antara kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok yang berpendapatan rendah. Pada dasarnya, kemiskinan yang tidak diatasi melalui kebijakan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan (Ashari *et al.* 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dan Prabowo (2024), menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin menyebabkan adanya ketimpangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah yang semakin melebar. Masyarakat miskin cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan sumber daya ekonomi, sehingga pendapatannya sulit meningkat.

#### **2.2.4 Hubungan Pengangguran dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

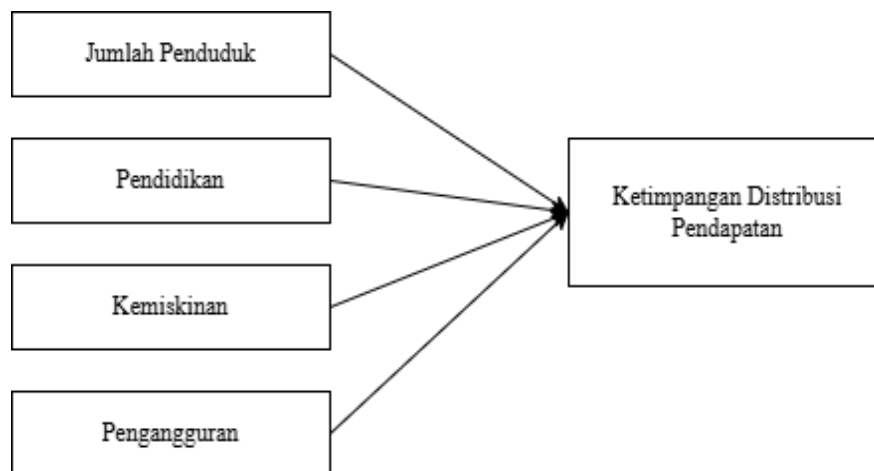
Hubungan antara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dijelaskan melalui Teori Pengangguran Klasik, yang menyatakan bahwa pengangguran menjadi faktor yang memperbesar ketimpangan pendapatan, karena hanya kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan tinggi atau modal yang mampu mempertahankan pendapatannya, sedangkan kelompok berpendapatan rendah kehilangan sumber penghasilan mereka. Dengan demikian, ketidakseimbangan upah dan kesempatan kerja yang diakibatkan oleh pengangguran berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga menciptakan jurang ekonomi yang lebih lebar antara kelompok kaya dan miskin (Taufiq *et al.* 2025).

Pengangguran memainkan peran penting dalam menentukan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Peningkatan jumlah pengangguran menunjukkan adanya keterbatasan dalam kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai, sehingga

dapat memperlebar jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, pengangguran yang tidak diatasi melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan (Rifaldo & Rejekiningsih, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Yoertiara & Feriyanto (2022) menyebutkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Meningkatnya jumlah pengangguran cenderung memperbesar ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini terjadi karena semakin banyak individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga pendapatan mereka menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan dan keterampilan tinggi tetap menikmati peningkatan pendapatan. Dengan demikian, kondisi tersebut menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin timpang, di mana kelompok berpendapatan tinggi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah serta pengangguran tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga memperkuat kesenjangan ekonomi secara struktural di masyarakat.

Dengan melihat hubungan secara teoritis dalam uraian kerangka pemikiran diatas maka model kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini :



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2023). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024.
2. Diduga jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024.